

# **PENERAPAN *TAX AMNESTY* (PENGAMPUNAN PAJAK) DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

**Oleh:**

**A.Dian Ade Erfina**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: [andidianadeerfina03@gmail.com](mailto:andidianadeerfina03@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti hingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui bagaimana Penerapan *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) berjalan dengan baik di lihat dari indikator pengungkapan, tebusan, tuntas sudah berjalan maksimal dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di lihat dari indikator patuh terhadap kewajiban administratif dan patuh terhadap kewajiban tahunan tidak berjalan maksimal atau kurang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Makassar Utara . Penerapan *Tax Amnesty* tidak berhubungan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) sudah baik di terapkan namun kepatuhan Wajib Pajak terus menurun hal ini dapat di lihat bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya.

Kata Kunci: *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak,

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara untuk meningkatkan pembangunan negara.

Kegiatan kenegaraan sulit untuk dapat dilaksanakan tanpa adanya pajak. Jika dilihat dari penerimaan negara dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, penerimaan negara dari sektor pajak

menjadi sumber dana utama yang sangat mendominasi. Uang pajak tersebut digunakan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Peran serta Wajib Pajak (WP) dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak, ini dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah WP semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *Tax*

*Ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan WP. Menurut Nugraha “Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah”.

Oleh sebab itu, kepatuhan WP merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Munculnya *Tax Amnesty* ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Pertama, Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh). Kedua, *Tax Amnesty* digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Mengingat besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan pemerintah dapat meningkatkan setiap tahunnya. Kantor pelayanan pajak (KPP) yang berada disetiap wilayah di Indonesia salah satunya adalah kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Utara harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu upaya yng dilakukan untuk menggali potensi perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan perpajakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2016, 2017, dan 2018 masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak patuh. Ini di buktikan dengan tabel pembayaran Wajib Pajak Badan dan jumlah Wajib Pajak Badan tahun 2016,2017, dan 2018.

**Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Badan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan</b>	<b>Jumlah Pelaporan</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak melapor</b>
2016	12.128	3.138	8.990
2017	12.870	3.189	9.681
2018	13.550	3.151	10.399

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Ngurah tahun 2017 dengan judul peelitian “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan hasil penelitian *tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemanfaatan penghapusan sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada program *tax Amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih kurang atau belum melaporkan hartanya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi hukum yang tegas akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan 200 persen membuat wajib pajak merasa takut untuk tidak melaporkan seluruh hartanya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putra tahun 2017 dengan judul penelitian “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan hasil penelitian Kepatuhan pendaftaran sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* periode pertama dan kedua, penambahan WPOP baru sewaktu *Tax Amnesty* diberlakukan (Juni-Desember 2016), tidak memperlihatkan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pendaftaran.

Perbedaan penelitian ini dengan dengan peneliti terdahulu yaitu lokus, peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ngurah dkk di KPP Pratama Denpasar Timur dan di KPP Pratama Padang Dua sedangkan penelitian ini di KPP Pratama Makassar Utara, Perbedaan fokus, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu *tax Amnesty* dan kepatuhan wajib pajak, Kemudian Perbedaan objek penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan.

Oleh karena permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul “Penerapan *Tax Amnesty* Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana

Penerapan *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Utara?

Rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi dasar menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Tax Amnesty* Dan Kepatuhan Wajib pajak Badan di KPP Pratama Makassar Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 angka 1. “ Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fungsi pajak menurut (Devano & Rahayu 2006 : 26) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan bahwa “pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan

membayar uang *tebusan* undang ini”.

Tujuan program pengampunan pajak adalah Memberikan kesempatan kepada pembayar pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu, Memberikan tambahan penerimaan pajak bagi negara, Memberikan kesempatan bagi pembayar pajak yang tidak patuh menjadi patuh dalam membayar pajak, Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang dan, Meningkatkan jumlah pembayar pajak dari masyarakat yang seharusnya. menurut Putra (2017:1) mengacu kepada Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 dimensi *Tax Amnesty* yaitu:a.Pengungkapan,b.Tebusan,dan c.Tuntas.

Mitchell (1996) dalam Andrian (2016) “mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian dari kepatuhan, Mitchell membedakan kepatuhan dan perjanjian sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan perjanjian tersebut”.

Sambodo (2015:15) mengatakan bahwa: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rusli, (2014) dalam Andrian, (2016:23) “merupakan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha dalam Suandy (2016: 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari: 1.Patuh terhadap kewajiban Administratif, 2.Patuh terhadap kewajiban tahunan 3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata tertulis, uraian yang diperoleh dari informan, dan perilaku subjek yang diamati.untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1.) pengumpulan informasi melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi.2.) adapun tehnik analisis data yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Makassar Utara.

Fokus penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu Peranan *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di

KPP Pratama Makassar Utara. Adapun Indikator *Tax Amnesty* yaitu pengungkapan, tebusan, dan tuntas. Dan indikator Kepatuhan Wajib Pajak yaitu patuh terhadap kewajiban administratif, patuh terhadap kewajiban tahunan, dan patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.

## HASIL PENELITIAN DAN

### PEMBAHASAN

Variabel *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dengan indikator sebagai berikut:

a).Pengungkapan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* dapat dengan mudah melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya kedalam surat pernyataan yang berbentuk formulir mengungkapkan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dan telah memperoleh Surat keterangan atau harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan Periode Pengampunan Pajak berakhir.

b.) Tebusan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengikuti *tax Amnesty* wajib membayar uang tebusan ke Kas Negara sesuai dengan periode yang Wajib Pajak yang mereka ikuti.

C.) Tuntas, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak badan

merasa sangat terbantu dan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana perpajakan. Wajib Pajak sudah tidak perlu dibebani lagi dengan perasaan takut dan waswas akan semua hal yang mungkin dulu ditutup-tutupi, disingkap, kini dapat dibuka seterang dan sejujur mungkin, dan Wajib Pajak dapat mengakui keseluruhan hartanya dengan benar dan valid.

**Tabel 2 Hasil penelitian variabel *Tax Amnesty* (pengampunan Pajak)**

NO	Indikator	Penerapan Tax Amnesty (pengampunan Pajak) dan kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar Utara	
		Baik	Kurang Baik
1	Pengungkapan	√	—
2	Tebusan	√	—
3	Tuntas	√	—

Berdasarkan tabel hasil penelitian diatas bahwa indikator variabel *Tax Amnesty* sudah diterapkan dengan baik.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator sebagai berikut:

a.)Patuh Terhadap Kewajiban Administratif , Berdasarkan hasil

penelitian, dapat disimpulkan bahwa, dengan aplikasi *e-billing* wajib pajak tidak terlambat membayar angsuran pajaknya, dalam hal ini Wajib Pajak juga banyak menggunakan jasa Konsultan untuk melaporkan SPT masa PPn dan PPh dengan tepat waktu.

b.) Patuh Terhadap Kewajiban Tahunan, Berdasarkan hasil penelitian bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan menghitung sendiri besaran pajaknya berdasarkan *Self Assesment*. Namun hal lain yang dikatakan oleh pegawai bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan telat melaporkan SPT tahunannya.

c.) Patuh Terhadap Ketentuan Material dan Yuridis Formal Perpajakan, Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua Wajib Pajak Badan (WP) yang terdaftar telah

memenuhi SOP sebagai syarat utama untuk menjadi wajib pajak.

**Tabel 3 Hasil Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Berdasarkan tabel penelitian diatas dapat diuraikan bahwa indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak badan kurang baik hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak menggunakan jasa konsultan dan tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) berjalan dengan baik di lihat dari indikator pengungkapan, tebusan, tuntas sudah berjalan maksimal dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di lihat dari indikator patuh terhadap kewajiban administratif dan patuh terhadap kewajiban tahunan tidak berjalan maksimal atau kurang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Makassar Utara . Penerapan *Tax Amnesty* tidak berhubungan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penerapan *TaxAmnesty* (Pengampunan Pajak) sudah baik di terapkan namun kepatuhan Wajib Pajak terus menurun hal ini dapat di lihat bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak

NO	Indikator	Penerapan Tax Amnesty (pengampunan Pajak) dan kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar Utara	
		Baik	Kurang Baik
1	Patuh terhadap kewajiban administratif	—	√
2	Patuh terhadap kewajiban tahunan	—	√
3	Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan	√	—

melakukan pelaporan setiap tahunnya.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian mengenai penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dan kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan *Tax Amnesty* yang akan diterapkan nantinya. Wajib Pajak harus memanfaatkan kebijakan *Tax Amnesty* dengan melaporkan harta dan kewajibannya dengan sejujurnya kepada Dirjen Pajak sehingga tidak akan terkena denda atau sanksi pajak. Dalam hal ini fungsi pengawasan Dirjen Pajak harus lebih maksimal sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan setiap tahunnya lebih ditingkatkan.

## **C. Saran**

Penelitian ini dapat dijadikan Evaluasi atas penerapan *Tax Amnesty*. Berikut terdapat beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini agar penerapan *Tax Amnesty* dapat terlaksana dengan baik sebagai berikut :

1. Perlunya memberi pengetahuan perpajakan secara teratur, sehingga Wajib Pajak memahami setiap program yang dijalankan DJP, maka Wajib Pajak memiliki kesadaran pentingnya pajak untuk Negara dan Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besar pajak terutanganya dengan benar serta melaporkan SPT dengan tepat waktu. Memberikan sanksi yang tepat sehingga
- memberikan efek kesadaran terhadap Wajib Pajak.
2. DJP dan pemerintah wajib menjaga kepercayaan masyarakat terkait penggunaan uang pajak hasil *Tax Amnesty* untuk dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat.
3. Memberikan *Reward* kepada Wajib Pajak terbaik yang melakukan pelaporan sehingga dapat memotivasi Wajib pajak lainnya yang kurang aktif melakukan pelaporan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Devano, Sony & Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu)*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huberman, Miles., M.B dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Ed 3. USA : Sage Publication.
- Mardimaso. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- . 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan (edisi Tax Amnesty)*. Yogyakarta: Quadrant.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat

———. 2016. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat

Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Pahala Marihot. 2016. *Tax Amnesty di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*, Edisi 7. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.

Subadriyah. 2017. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## 2. Artikel, Internet, dan Jurnal

Husnurrosyidah, 2016 Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 2, 2016, 211 - 226.

Nadia, Elisabeth. 2017. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado*, volume .12(2), 2017, 175-187

Ngurah, Ida Bagus & Noviani, Naniek. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, volume. Vol.21.3.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara tahun 2018.

<https://www.ortax.org>

## 3. skripsi

Andrian, Rezki 2016. Analisis Penerapan *Tax Amnesty* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (skripsi)

Anita. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap



Kepuasan Masyarakat  
Pada Kantor Kelurahan  
Karuwisi Kecamatan  
Panakukang Kota  
Makassar. Skripsi  
(Makassar: Fakultas Ilmu  
Sosial Universitas Negeri  
Makassar), hal. 32.

Nugraha, Gusrianda. 2018. Pengaruh  
Pemeriksaan Pajak Dan  
Pelaksanaan *Tax Amnesty*  
Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Dan  
Dampaknya Bagi  
Penerimaan Pajak.  
Universitas Pasundan.  
Hal 41 (skripsi)

Putra, Wahyu  
Agustira, 2017. pengaruh  
kebijakan *tax Amnesty*  
terhadap kepatuhan wajib  
pajak orang  
pribadi. Universitas  
Andalas (skripsi).

Erni Cahyani, 2018. Kepatuhan Sukarela  
Wajib Pajak Dalam  
Pelaksanaan *Tax Amnesty*  
Pada Kantor Pelayanan  
Pajak (Kpp) Pratama  
Makassar Utara. Sekolah  
Tinggi Ilmu Administrasi  
Lembaga Administrasi  
Negara Makassar (skripsi)

## **2. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang No 11 pasal 2 tahun  
2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:  
74/PMK.03/2012

Undang-undang Nomor 36 Tahun  
2009 tentang Pajak Penghasilan